

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kesempatan Kerja

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Dapat dikatakan ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan baik struktural ataupun sektoral. maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya guna tenaga kerja. Permintaan Tenaga kerja yang dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (*Value of Marginal Product, VMP*), Penawaran Tenaga Kerja yang dipengaruhi oleh jam kerja yang luang dari tenaga kerja individu serta upah, secara teoretis harus diperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan mendekati tujuan yang diinginkan

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah di pahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah gampang karena di samping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di

masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.

Tulisan ini ingin memaparkan teori yang berhubungan dengan tenaga kerja beserta beberapa potretnya di Indonesia, dimana pembahasannya dimulai dari teori permintaan tenaga kerja, teori penawaran tenaga kerja, teori upah serta potret tenaga kerja di Indonesia. Diharap dengan paparan ini maka kompleksitas ketenagakerjaan dapat lebih di pahami.

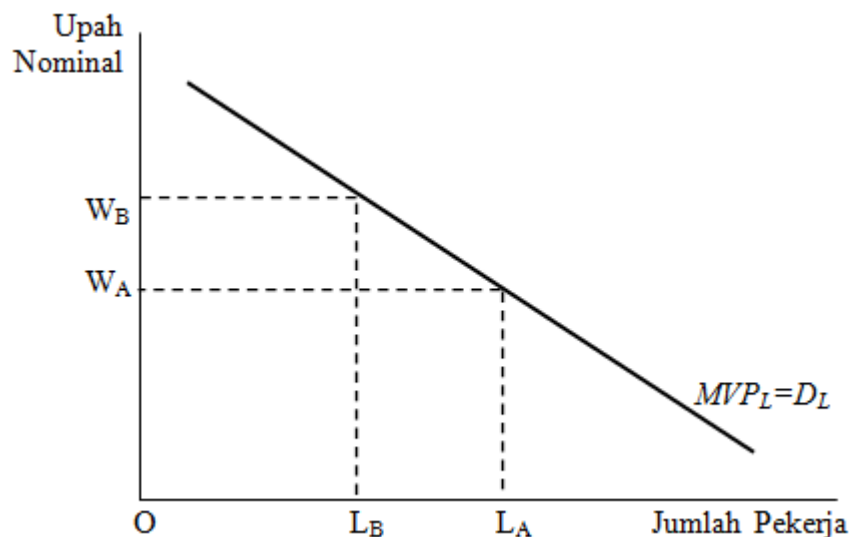
2.1.1.1 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus di pengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan dengan pola yang tidak selalu mudah di pahami. Kondisi kerja yang baik adalah kualitas dan output yang baik. karena untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah mudah,

disamping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga di ketahui prospek tenaga kerja di masa depan. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan kita untuk terjun di dunia kerja.

Dalam hal permintaan tenaga kerja, pemilihan tingkat output yang memaksimalkan laba juga mencerminkan kan laba pemilihan input yang menghasilkan tingkat output dimaksud. hal berarti permintaan terhadap input tidak dapat dipisahkan dari pilihan tingkat output. Permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pada permintaan terhadap output. adanya penurunan permintaan terhadap output akan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan sebaliknya. faktor yang menentukan permintaan tenaga kerja adalah produk Marginal Tenaga Kerja dan harga output



Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Penambahan seorang pekerja akan menambah output sebesar produk marginal tenaga kerja (*Marginal Product of Labor = MP_L*). Pada pasar persaingan sempurna, dengan tingkat harga produk setinggi P_Q , maka nilai produk marginal tenaga kerja (*Marginal Value Product of Labor = MVP_L*) adalah harga

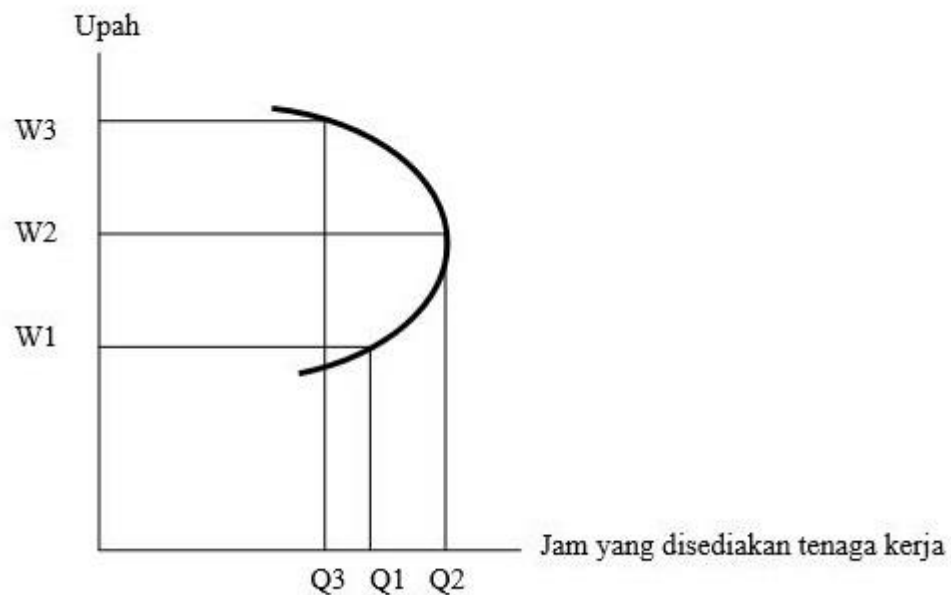
output dikalikan produk marjinal ($MVP_L = P_Q \times MP_L$). Di sisi lain, penambahan seorang pekerja membebani biaya perusahaan sebesar tingkat upah nominal pekerja W . Apabila nilai produk marjinal tenaga kerja (MVP_L) lebih tinggi daripada tingkat upah nominal W , maka perusahaan akan menambah jumlah pekerja, dan sebaliknya. Perusahaan yang memaksimalkan laba, akan memperkerjakan sejumlah pekerja sampai dicapai suatu keadaan yang ditandai adanya kesamaan antara tingkat upah nominal dengan nilai produk marjinal tenaga kerja

2.1.1.2 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala

tertentu Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Misalkan seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi (\hat{w}). Pada tingkat upah diatas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu..



Gambar 2.2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran setiap kali masyarakat mengubah jumlah jam kerja sesuai keinginan mereka pada tingkat upah tertentu. Tetapi sampai tingkat upah tertentu (W_3), seseorang merasakan waktu nilai hidupnya (utilitas hidupnya) telah menurun karena hampir seluruh waktu nilai untuk bekerja. Akhirnya dia merasa biaya kesempatan dari bekerja amat mahal. Dan jam kerjanya pun berkurang (Q_2 Q_3) yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Lalu diagram tentang kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung membalik (*backward bending labour supply curve*).

2.1.1.3 Teori Upah

Teori tentang pembentukan harga (*pricing*) dan pendayagunaan input (*employment*) disebut teori produktivitas marjinal (*marginal productivity theory*), lazim juga disebut teori upah (*wage theory*). Produktivitas marjinal tidak terpaku semata-mata pada sisi permintaan (*demand side*) dari pasar tenaga kerja saja. telah diketahui suatu perusahaan kompetitif yang membeli tenaga kerja di suatu pasar yang kompetitif sempurna akan mengerahkan atau menyerap tenaga kerja sampai ke suatu titik dimana tingkat upah sama dengan nilai produk marjinal (YMF).

Jadi pada dasarnya, kurva permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja. Tingkat upah dan pemanfaatan input (*employment*) sama-sama ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Berbicara mengenai teori produktivitas marjinal upah sama saja dengan berbicara mengenai teori permintaan harga-harga; dan kita takkan dapat berbicara mengenai teori permintaan harga-harga tersebut karena sesungguhnya harga itu tidak hanya ditentukan oleh permintaannya, tapi juga oleh penawarannya.

2.1.1.4 Potret Tenaga Kerja Indonesia

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang penting adalah modal asing, proteksi iklim investasi, pasar global, dan perilaku birokrasi serta "tekanan" kenaikan upah (Majalah Nakertrans, 2004). Otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang pernah diajukan oleh Misi ILO (1999:5) yaitu (i) strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan (ii) tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

kemiskinan yang masih melanda Indonesia merupakan lingkaran setan yang sulit diputus. Hal ini terjadi di karena pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah ah ngak ibaratkan tabungan rendah, keadaan tabungan rendah maka pembentukan modal rendah, pembentukan modal rendah, tingkat investasi Pun menjadi rendah akibat investasi yang rendah produktivitas menjadi rendah produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan rendah dan seterusnya.

Bila Jumlah penduduk Indonesia adalah 208 juta jiwa, sementara Jumlah penduduk angkatan kerja 106 juta jiwa maka, jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 102 juta jiwa. Ini berarti Jumlah pengangguran 11 juta jiwa. Sedangkan angka beban ketergantungan dapat dihitung sebagai: $DR = \frac{\text{Produktif/non produktif-produktif}}{\text{Produktif}} \times 100$ atau sama dengan 103, 92 juta jiwa ,dibulatkan menjadi 104 juta jiwa. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 104 penduduk usia non produktif. Sebagai gambaran maka potret ketenagakerjaan dapat dilihat pada beberapa data pada tahun 2006 berikut ini:

Tabel 2.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2006

Lapangan pekerjaan utama	Jenis kelamin		jumlah
	Laki-laki	perempuan	
Pertanian	27.468.466	14.854.724.	42.323.190
Pertambangan	805.578	141.519	947.097
Indsutri	6.873.835	4.704.306	11.578.141
Listrik, Gas dan Air	194.940	12.162	207.102
Bangunan	4.249.018	124.932	4.373.950
Perdagangan	10.162.347	8.392.710	18.555.057
Angkutan	5.268.277	199.031	5.467.308
Keuangan	836.305	316.987	1.153.292
Jasa lainnya	6.005.561	4.566.404	10.571.965
jumlah	61.846.327	33.312.775	95.177.102

Sumber : BPS,Sakernas 2006

2.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1.2.1 pengertian PMA

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi asing langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA),

merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman Modal Asing (*foreign direct investment*) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, disebutkan terlebih dulu definisi modal asing pada pasal 1, yaitu sebagai berikut: Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

- A. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- B. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Sedangkan menurut Ismail Sunny dan Rudiono Rochmat (1968) berpendapat bahwa Penanaman Modal Asing mengandung 3 unsur pokok yaitu:

1. Penanaman secara langsung.
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.
3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Penanaman Modal Asing (PMA) bermula ketika modal yang berasal dari perusahaan asing ditanamkan ke sebuah perusahaan yang berada di dalam negeri. Oleh sebab itu perusahaan yang berada di negara tujuan dapat dipengaruhi oleh perusahaan yang berasal dari negara asal investasi tersebut, baik pengaruhnya sebagian maupun keseluruhan. Negara penerima investasi asing akan menerima keuntungan antara lain adanya pembaharuan teknologi dari barang modal yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan atau perdagangan barang dan jasa. Selain itu dengan adanya PMA dapat menjadi sarana bagi pasar domestik untuk dapat dipromosikan. PMA juga melakukan pelatihan untuk karyawan sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan SDM di negara tujuan. Keunggulan yang dihasilkan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan kerjasama antara pihak swasta nasional dengan swasta asing. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi.

2.1.2.2 Teori Penanaman Modal Asing

Menurut Anoraga Panji, Teori-teori yang erat dengan Penanaman Modal Asing dilihat dari sisi ahlinya adalah:

1. Teori alam M. Rugman

Bahwa Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu:

- A. Variabel ekonomi, biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen.
- B. Variabel non ekonomi, meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Bahwa kenyataannya setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas.
- C. Variabel pemerintah, yang harus diperhatikan oleh perusahaan penanam modal asing dimana modal asing akan masuk.

Setiap negara mempunyai kekhususan merek politiknya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional (investasi).

2. Teori John Dunning

Sebagai teori ancangan eklektis, teori ini menetapkan tiga persyaratan yang diperlukan suatu perusahaan akan berkecimpung dalam Penanaman Modal

Asing yaitu: Keunggulan spesifik, Keunggulan internalisasi, Keunggulan spesifik negara.

3. Teori David K. Eitemen

Mengemukakan tiga motif yang mempengaruhi arus Penanaman Modal Asing ke negara penerima modal yaitu:

A. Motif strategis

Dibedakan dalam hal: Mencari pasar, Mencari bahan baku, Mencari efisiensi produksi, Mencari pengetahuan, dan Mencari keamanan politik.

B. Motif perilaku

Merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dan organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu dan kelompok.

C. Motif ekonomi

Merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

4. Teori Robock & Simmonds

Melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional, model imperialisasi Marxis. Melalui pendekatan global, kekuatan internal yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing yaitu pengembangan teknologi atau produk baru, ketergantungan pada sumber bahan baku, memanfaatkan mesin-

mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Kekuatan eksternal yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

5. Teori Kindleberger

Aspek yang paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung atau direct investment. Amerika Serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka.

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata pertahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah,

perpustakaan, dan sebagainya untuk mendukung penyiapan sumber daya manusia, diperlukan dana yang disebut dana investasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 1968 pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal 1 tahun. Menurut Undang-Undang tersebut pada pasal 3, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh Negara atau swasta nasional. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya yang sudah diatur oleh pemerintah dan Undang-Undang.

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang menyelenggarakan usaha-usaha, agar pada waktunya perusahaan-perusahaan

nasional dapat menampung dan melakukan fungsi serta kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang batas waktunya telah berakhir.

Dalam Undang-Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) menciptakan lapangan pekerjaan.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonom riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal dapat berupa (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007):

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.

- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan masuk atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
- 4) Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat di produksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
- 6) Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

2.1.4 Pendapatan Nasional

2.1.4.1 Pengertian pendapatan nasional

Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Menurut Sadono Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara fiknitif pendapatan nasional merupakan

nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB dan PNB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

2.1.4.2 Konsep dan Istilah yang Terkait dengan Pendapatan Nasional

Istilah-istilah yang harus dipelajari berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu:

A. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Di negara berkembang Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Dimana didalamnya termasuk output

barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara yang bersangkutan maupun milik warga negara asing yang berdomisili di negara yang bersangkutan. Didalam perekonomian negara maju maupun berkembang barang dan jasa diproduksi bukan dari perusahaan milik penduduk negara tersebut namun juga berasal dari perusahaan milik negara lain atau perusahaan asing. Adanya perusahaan multinasional dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Perusahaan multinasional menyediakan modal, teknologi serta tenaga kerja dimana perusahaan tersebut beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi didalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta menambah ekspor. Operasi perusahaan multinasional merupakan bagian yang cukup penting kegiatan ekonomi suatu negara dan nilai produksi yang disumbangkan dalam perhitungan pendapatan nasional.

B. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun. Dimana yang dihitung dalam kategori PNB adalah produksi barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh factor-faktor produksi/input yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan, baik yang secara geografis berdomisili didalam negeri maupun yang secara geografis berada dinegara lain atau luar negeri.¹⁹ Pengelompokan PDB dan PNB terdapat dua kategori yaitu PDB atau PNB nominal dan PDB atau PNB riil. PDB atau PDB nominal adalah pengukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara menurut harga yang berlaku ketika barang dan jasa

tersebut diproduksi. Sedangkan PDB atau PNB rill merupakan pengukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi pada kurun waktu tertentu menurut harga konstan pada tahun tertentu (sebagai tahun dasar) dan seterusnya digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional pada tahun berikutnya.

C. Produk Nasional Neto (*Net National Product*)

Investasi dalam sektor perusahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya investasi dapat mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimasukan adalah total pengeluaran investasi bruto. Namun yang lebih relevan adalah investasi neto (investasi bruto-depresiasi). Untuk menghasilkan output yang lebih akurat, maka PNB dikurangi depresiasi yang menghasilkan NNP.

D. Pendapatan Nasional (*National Income*)

Dalam perhitungan output nasional dengan metode pendapatan dijelaskan bahwa Pendapatan Nasional (PN) adalah balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN ke PNN harus mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung dan menambahkan angka subsidi.

2.1.4.3 Perhitungan Pendapatan Nasional

Secara teoritis, perhitungan GNP dilakukan dengan tiga cara, yakni sebagai berikut:

A. Pendekatan produksi (*Production Approach*)

Menurut pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif. Cara ini menghasilkan gross national product atau GNP Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (*value added*) dari masing-masing lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan Internasional Standard Industrial Classification (ISIC) yang dikeluarkan oleh PBB terdapat 9 klasifikasi lapangan usaha/sektor ekonomi adalah :

1. Pertanian (perternakan, kehutanan, dan perikanan/*agricultural*).
2. Pertambangan dan penggalian/*minning and quarrying*.
3. Industri pengolahan/ *manufacturing industries*.
4. Listrik, gas & air/ *electric, gas and water supply*.
5. Kontruksi/ *construction*.
6. Perdagangan, hotel & restoran/ *trade, restaurant and hotel*.
7. Pengangkutan dan komunikasi/ *transformation and communication*.
8. Keuangann, real estate, & jasa perusahaan/ *finace, rent of building and business service*.
9. Jasa-jasa/ *service*.

B. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi/perekonomian atau dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang berupa upah/gaji, laba usaha, tingkat suku bunga dan sewa. Cara ini menghasilkan gross national income atau GNI Adapun pendapatan yang diterima oleh pemilik factor produksi sebagai balas jasa yang diterima dalam proses produksi yaitu sebagai berikut:

1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja
2. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal
3. Sewa (r) = balas jasa pemilik tanah
4. Keuntungan (π) = balas jasa pengusaha

C. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektorsektor yang terlibat dalam perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat kedalam barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Cara ini menghasilkan *Gross National Expenditure* atau GNE. Nilai barang dan jasa yang dijumlahkan hanyalah nilai barang jadi atau barang antara. Di Indonesia terdapat 5 jenis pengeluaran dalam perekonomian antara lain:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G).

3. Pembentukan modal tetap *domestic bruto* (I).
4. Perubahan inventaris.
5. Espor neto (ekspor dikurangi impor) (X-M).

2.1.5 Suku Bunga

2.1.5.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Suku bunga nominal adalah *rate* yang dapat diamati pasar.
2. Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

$$r = i - \mu$$

Dimana: r = suku bunga riil

i = suku bunga nominal

μ = laju inflasi

2.1.5.2 Teori Tingkat Suku Bunga

1) Teori Klasik

Tabungan, simpanan menurut teori klasik adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk

menyimpan dananya di bank. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *loanable funds*, atau dapat diartikan sebagai dana yang tersedia untuk di pinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di pasar investasi.³ Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga.

Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.

2) Teori Keynes tentang Suku Bunga

Teori Keynes menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang diberi istilah *Liquidity preference*, adanya permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang

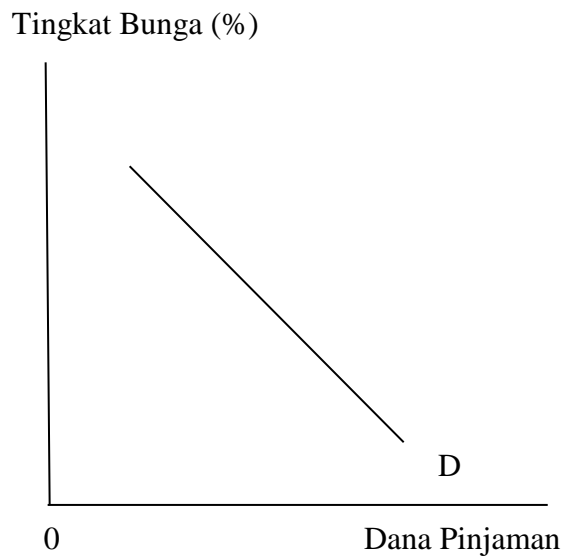
menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi.

2.1.5.3 Pasar Dana Pinjaman (*Market for loanable funds*)

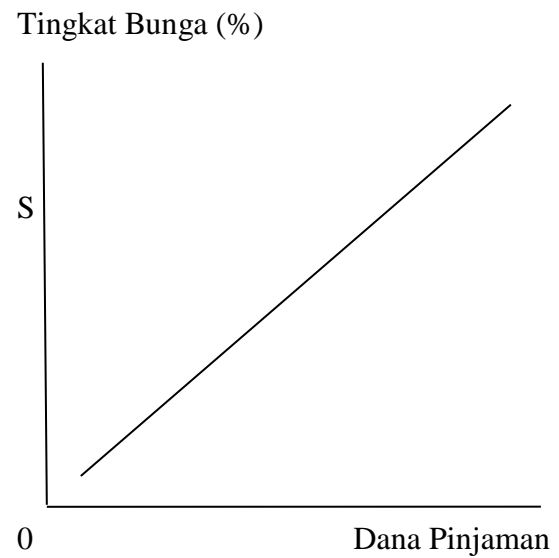
Pasar dana pinjaman ini menjelaskan tentang interaksi antara permintaan dan penawaran dana pinjaman yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah pinjaman dan tingkat bunga. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan *loanable funds*. Dasar pemikiran dari timbulnya penawaran akan *loanable funds* adalah berasal dari masyarakat yang menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung. Dapat dijelaskan disini bahwa jika pada suatu periode tertentu ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi dari apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya selama periode tersebut, maka mereka ini adalah kelompok penabung. Bersama-sama atau seluruh jumlah tabungan mereka membentuk penawaran akan *loanable funds*.

Kurva permintaan pinjaman seperti tampak gambar 2.1 (a), mempunyai kemiringan negatif, bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Bila tingkat bunga rendah, permintaan pinjaman akan bertambah karena akan semakin banyak investasi, modal kerja maupun konsumsi dengan asumsi *ceteris paribus*, dan begitu pula sebaliknya. Permintaan dana pinjaman berasal dari bisnis domestik, konsumen dan pemerintah serta pinjaman yang dilakukan oleh orang asing di pasar domestik.

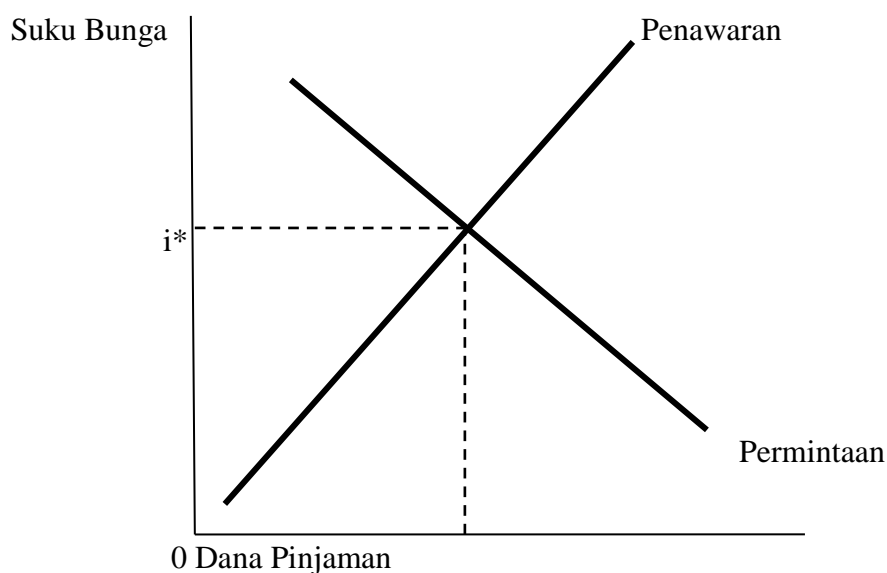
Kurva penawaran pinjaman seperti dapat dilihat pada gambar 2.1 (b), mempunyai kemiringan positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menggambarkan hubungan positif antara tingkat bunga dan penawaran pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menabungkan uangnya sehingga semakin besar pula dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan asumsi *ceteris paribus*, dan begitu pula sebaliknya. Penawaran dana pinjaman berasal dari terdiri dari penjumlahan tabungan domestik, laba ditahan, penciptaan kredit oleh sistem perbankan, dana pinjaman dari institusi dan individu asing di pasar domestik.



Gambar 2.3 (a) Kurva Permintaan Pinjaman



Gambar 2.4 (b) Kurva Penawaran Pinjaman



Gambar 2.5 Keseimbangan Tingkat Bunga

Selanjutnya, penawaran dan permintaan ini bertemu di pasar *loanable funds*. Dari proses tawar-menawar antara mereka akhirnya akan dihasilkan tingkat bunga keseimbangan seperti tampak gambar keseimbangan tingkat bunga pada *loanable funds* dapat diartikan sebagai:

1. Jumlah penawaran pinjaman sama dengan jumlah permintaan pinjaman,
2. Tabungan sama dengan investasi dalam perekonomian secara keseluruhan,
3. Penawaran uang sama dengan permintaan uang.

Akibat kekuatan antara permintaan dan penawaran pinjaman, akan tercipta keseimbangan tingkat bunga *loanable funds*. Namun demikian pastinya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dari kedua kurva tersebut. Yaitu mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri, yang menyebabkan perubahan ekuilibrium tingkat bunga *loanable funds*. Hal ini disebabkan bukan dari faktor suku bunga dan jumlah pinjaman masing-masing kurva tetapi justru disebabkan oleh faktor dari luar kedua variabel tersebut, sehingga bukan lagi *ceteris paribus*

yang terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah yaitu:

1. kebijakan untuk meningkatkan tabungan (*saving incentives*).
2. kebijakan untuk meningkatkan investasi (*investment incentives*).
3. kebijakan mengenai anggaran baik anggaran defisit ataupun surplus.

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank tersebut agar dana cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan suku bunga pinjaman.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam jika ingin cepat memperoleh kebutuhan dana, maka suku bunga untuk simpanan harus lebih besar dari suku bunga pesaing. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus lebih kecil dari suku bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman suatu bank tidak boleh melebihi bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu suku bunga BI.

4. Harga laba yang diinginkan

Sesuai dengan target yang diinginkan besar, maka tingkat suku bunga besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besar kemungkinan resiko dimasa akan datang.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga pinjaman yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh pinjaman sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko pinjaman macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya berdasarkan keaktifan dan loyalitas terhadap pihak bank yaitu nasabah utama dan nasabah biasa. Nasabah utama biasanya memiliki hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunga juga akan berbeda dengan nasabah biasa.

9. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima pinjaman, biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankanpun berbeda.

2.1.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Maemun Sholeh (2007)	Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah : Teori serta beberapa potretnya di indonesia	Permintaan tenaga kerja, Penawaran tenaga kerja, Value of Marginal Product, upah	Dapat dikatakan ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan baik struktural ataupun sektoral. Walaupun telah terjadi pergeseran namun sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dalam hubungan ini, maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya guna tenaga kerja. Untuk mewujudkan pendayagunaan tenaga kerja maka perlu dilaksanakan berbagai kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif.
2	Lailan safina sri endang rahayu (2011)	Analisis pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap penciptaan kesempatan kerja di sumatera utara	Investasi pemerintah, Penanaman Modal Asing/PMA, Penanaman Modal Dalam Negeri /PMDN, Kesempatan kerja	Berdasarkan penelitian “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Investasi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat

				<p>penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien 80,882. Artinya apabila investasi pemerintah naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 80,882%.</p> <p>Variabel X2 (PMDN) mempunyai pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien – 0,174. Artinya apabila PMDN naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara turun sebesar 0,174%. Variabel X3 (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan besar koefisien 2,004. Artinya apabila PMA naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 2,004%.</p> <p>2. Koefisien R Square dengan nilai 0,296 yang artinya secara bersama-sama Investasi pemerintah, PMDN dan PMA mampu memberikan variasi penjelasan tingkat kesempatan kerja sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model atau berada dalam disturbance error term.</p>
3	Akhmad	Pengaruh	Investasi	Berdasarkan hasil analisis

	Syaihu (2012)	investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja dan pengangguran	swasta, Investasi pemerintah, Kesempatan kerja, pengangguran	dana pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : investasi swasta berpengaruh secara langsung terhadap kesempatan kerja di provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 0260 atau 26%. Investasi swasta berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 0.911 atau 91.10%
4	Eliza (2016)	Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia	Investasi, Pekerjaan, Harrod Domard	Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan terhadap pengaruh investasi (PMDN dan PMA) terhadap kesempatan kerja di Indonesia, maka dapat disimpulkan: 1) analisa data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel indepoenden (PMDN dan PMA) berpengaruh positif dengan variabel dependen (Kesempatan Kerja). Dengan demikian, kenaikan atau perubahan variabel independen akan merubah variabel dependen secara langsung; 2) hasil penemuan empiris selama periode tahun 1999-2013 diperoleh hasil jumlah investasi dalam negeri (PMDN) mempunyai pengaruh yang positif atau signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia yang ditunjukkan dari nilai

				<p>thitung sebesar 3,250 dan t-tabel sebesar 2,160;</p> <p>3) selama periode tahun 1999-2013 diperoleh gambaran jumlah investasi asing (PMA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 3,090 dan t-tabel sebesar 2,160;</p> <p>4) secara umum jumlah investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) sebagai variabel bebas sangat berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia sebagai variabel terikat. Hal ini ditunjukkan dari nilai variansi naik turunnya (R²) pengaruh PMDN dan PMA terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia sebesar 68 persen, sedangkan sisanya 32 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.</p>
5	Febrina Rizki Syaharani (2011)	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia	Pertumbuhan ekonomi, PMDN, PMA, Utang luar negeri	<p>1. hasil pengujian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95%.</p> <p>2. hasil pengujian ini menunjukkan bahwa probabilitas tingkat signifikan pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebesar 0,7753 dengan tingkat kepercayaan 95%.</p>

				3. hasil pengujian menunjukkan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	Rudi Sofia Sandika (2014)	Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan	Investasi, PMDN, PMA, Kesempatan Kerja	<p>1. Dalam hal investasi, pemerintah daerah sebaiknya melakukan dan mengarahkan investasi tidak hanya pada industri padat modal yang lebih banyak menggunakan investasinya untuk membeli mesin-mesin sehingga tenaga kerja digantikan fungsinya oleh mesin, melainkan juga di industri padat karya mengingat banyaknya tenaga kerja yang seharusnya bisa diserap.</p> <p>2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.</p> <p>3. Penelitian hanya membahas pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja saja. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-</p>

				faktor lain yang mempengaruhi kesempatan kerja seperti PDRB, tingkat bunga kredit dan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.
7	Ari Yuliasuti (2018)	Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia	Investasi, PMA, Kesempatan Kerja,	Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia berdampak pada semakin tingginya jumlah TKA, meskipun menurut data yang ada TKA masih dalam koridor sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu pada posisi-posisi jabatan yang diperbolehkan. Berdasarkan data dari Kemnaker, BKPM dan BPS yang dianalisis dapat diambil kesimpulan bahwa kecenderungan jumlah TKA di Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, di sisi lain jumlah TKA dari RRC justru meningkat. Peningkatan TKA asal RRC ini kemungkinan sebagai akibat dari peningkatan investasi dari negara yang sama di Indonesia.
8	Lien Damayanti (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Pada Usaha Tani Padi	Produksi, Pendapatan, Kesempatan Kerja,	Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Produksi usaha tani padi sawah dipengaruhi oleh luas lahan, penggunaan benih,

		Sawah Di Daerah Irigasi Parigi Moutong		<p>penggunaan pupuk urea, pupuk phonska, pestisida, total tenaga kerja, usia petani, frekuensi bimbingan petani dan Irigasi. Dimana irigasi dapat meningkatkan produksi usaha tani padi sawah sebesar 3,98%, 2. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga dipengaruhi oleh produksi, upah tenaga kerja, pendidikan petani dan irigasi. Dimana irigasi dapat menurunkan penggunaan tenaga kerja sebesar - 8,14%</p> <p>3. Pendapatan usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan, harga benih, harga pupuk urea, harga pupuk phonska, harga pestisida, pendidikan petani, upah tenaga kerja dan irigasi. Dimana irigasi dapat meningkatkan pendapatan usaha tani sebesar 1,44%</p>
9	Bayu Dwi, Dharma Sjamsu Djohan (2015)	Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Samarinda	Investasi, Inflasi, Pertumbuhan Keonomi, Kesempatan Kerja,	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi menunjukkan nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Yang berarti peningkatan Investasi di Kota Samarinda akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. 2. Inflasi menunjukkan nilai negatif dan berpengaruh secara

				<p>signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Yang berarti naiknya tingkat inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.</p> <p>3. Investasi menunjukkan nilai positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Samarinda. Yang berarti Peningkatan Investasi di Kota Samarinda tidak mempengaruhi jumlah kesempatan kerja secara signifikan..</p> <p>4. Inflasi menunjukkan nilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di kota Samarinda. Peningkatan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan menurunkan kesempatan kerja di kota Samarinda .</p> <p>5. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di kota Samarinda. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tersedianya kesempatan kerja di kota Samarinda</p>
10	Siwi Nur Indriyani (2016)	Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015	Inflasi, Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi	<p>Berdasarkan hasil bahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <p>1). Terdapat hubungan antara pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2005-</p>

				<p>2015.</p> <p>2). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2005-2015 atas Inflasi dan Suku Bunga memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan Inflasi dengan Suku Bunga memiliki hubungan yang lemah.</p> <p>3). Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2005-2015.</p> <p>4). Secara partial Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2005-2015.</p>
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Kesempatan Kerja

Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan output, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, karena program investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak Investasi pada penyerapan tenaga kerja antara lain Greenaway, Morgan dan Wright (2002) yang menunjukkan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi langsung dari modal asing membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negara berkembang. Penelitian lain dari Ramsletter (2004), selama tahun 1996 hingga 2000, menunjukkan adanya pola ketertarikan para pencari kerja yang

berpendidikan tinggi di Thailand untuk bekerja di perusahaan asing, karena standar upah yang lebih tinggi. Fenomena menarik bahwa dalam industri manufaktur, penggunaan teknologi komputerisasi ternyata tidak memberikan efek substitusi yang kuat terhadap penggunaan pekerja terdidik. Namun, pada industri jasa, penggunaan komputerisasi memiliki efek substitusi terhadap penggunaan tenaga kerja terdidik. Di Indonesia, sebagian besar industri yang menjadi sasaran investor asing selama periode 2002 hingga 2007 adalah industri manufaktur dengan penggunaan komputerisasi. Jika dikaitkan dengan kondisi angkatan kerja Indonesia yang mayoritas berpendidikan rendah, maka investasi pada industri tersebut kurang memberikan efek positif pada kondisi tenaga kerja Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja berpendidikan SMP atau kurang, dan selebihnya (sekitar 40%) adalah pekerja yang berpendidikan SMP ke atas (Wartaman, 2007). Elastisitas besamya tenaga kerja yang terserap oleh PMA di Indonesia selama tahun 2002 hingga 2007 menunjukkan angka 0,37 yang berarti setiap penyerapan satu tenaga kerja diperlukan rata-rata US\$ 370 dari PMA.

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Kesempatan Kerja

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya bila jumlah PMDN bertambah maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Hal tersebut telah sesuai dengan teori dan hipotesa yang diajukan. Ini berarti terdapat korelasi positif antara pertumbuhan PMDN dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sangat wajar karena nilai investasi memegang peranan yang sangat penting dalam

rangka menunjang dan mempercepat pertumbuhan lapangan kerja yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Semakin besar nilai investasi PMDN yang di tanamkan, semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan begitu sebaliknya.

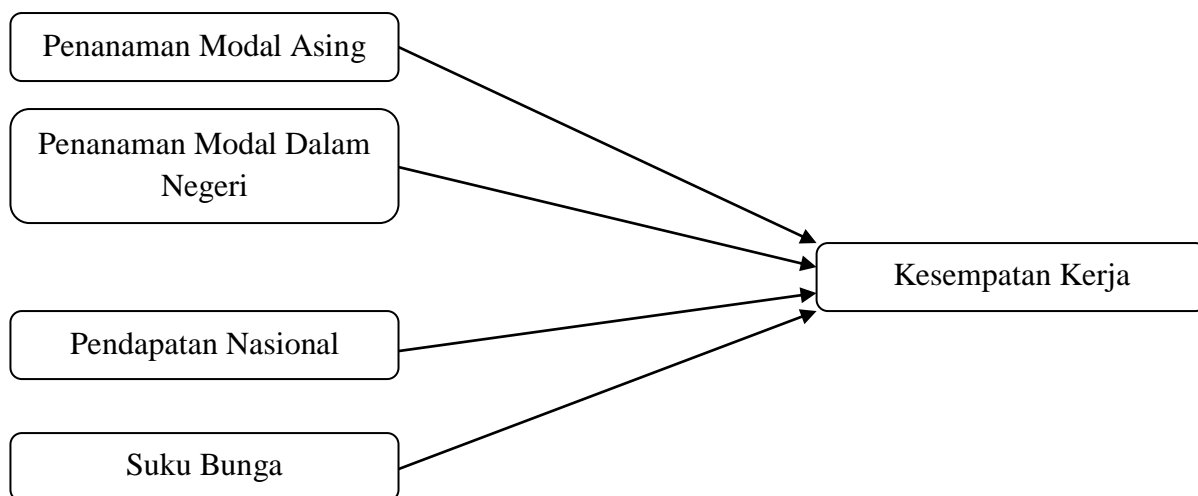
2.2.3 Hubungan Pendapatan Nasional dengan Kesempatan Kerja

Hubungan antara kesempatan kerja dan pendapatan nasional yaitu semakin besar kesempatan kerja maka akan semakin besar juga pendapatan nasional, karena kesempatan kerja memberikan pendapatan masyarakat, dan pendapatan masyarakat dihitung dalam pendapatan nasional. Upah yang diterima oleh tenaga kerja indonesia (TKI) lebih kecil dibanding upah tenaga kerja asing lainnya. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara meningkatkan mutu SDM sehingga mampu bersaing dan dapat memperoleh upah yang lebih tinggi lagi.

2.2.4 Hubungan Suku Bunga dengan Kesempatan Kerja

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel Tingkat Bunga dan PDRB terhadap Kesempatan Kerja sektor jasa yang diharapkan akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kesempatan kerja, referensi bagi peneliti selanjutnya dan informasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Adapun alat analisi yang digunakan adalah statistik regresi linier berganda yang diolah dengan program SPSS. Dengan hasil

penelitian PDRB mempunyai pengaruh dominan dan tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh berarti terhadap kesempatan kerja.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Hubungan kesempatan kerja dengan variabel-variabel bebasnya yaitu Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, pendapatan, dan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Nasional, berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

2. Diduga secara bersama-sama Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, pendapatan, dan suku bunga berpengaruh terhadap kesempatan kerja.